



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULHAN ARIYANTO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **480644**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.230.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/115 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 980.000.000
2. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **366.250.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS S A/T LIMITED MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 107.500.000
5. MOTOR, HONDA V1JO2032L1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.750.000
7. MOTOR, VESPA PRIMAVERA 150 YACHTCLUB EDITION MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **199.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	57.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	130.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.982.250.000
III. HUTANG	Rp.	40.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.942.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.